

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL**

Dunia Islam merupakan entitas yang unik karena mereka tidak disatukan oleh kedekatan geografis, kesatuan budaya, dan persamaan sejarah kebangsaan. Persaudaraan Islam diikat oleh kesatuan pandangan akan kepentingan umat Islam dunia. Masyarakat Islam yang terbentang dari benua Afrika, Eropa, Timur tengah, Asia Tengah, Cina, Benua Amerika Hingga Asia Tenggara tersekut oleh kenyataan sejarah dan politik bahwa mereka berada dalam sebuah negara-bangsa yang berbeda.

Kenyataan sejarah juga telah memperlihatkan benturan peradaban antara dunia Islam dengan barat yang memisahkan mereka pada garis demarkasi jelas tentang makna kemajuan masyarakat global. Pada faktanya negara-negara yang masyarakatnya dominan Islam cenderung terbelakang dalam hal ekonomi dan politik. Pada masyarakat barat khususnya, muncul “Islamophobia” yang turut memberi kesan bahwa Islam adalah penyakit peradaban modern.

Kini umat Islam tidak lagi berada dalam satu unit politik dan ekonomi yang sama. Mereka berada dalam negara dan bangsa yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu sama lain. Terlepas dari semua itu, keterwakilan kepentingan umat Islam juga adalah bagian yang utuh dari kepentingan nasional masing-masing negara tersebut. Sejauh ini gerakan politik Islam hanya membangun sentimen keagamaan ketimbang mengembangkan model politik dan ekonomi

yang berbasis Islam sebagai alternatif menjawab tantangan peradaban yang global ini.

Tulisan ini sebagai salah satu usaha memahami kondisi dunia Islam pada berbagai aktivitas politik terutama dalam hubungan antara bangsa yang dipisahkan oleh entitas politik “negara”. Kemunculan gerakan nasionalisme yang diadopsi dari barat turut meruntuhkan sendi-sendi politik khilafah Islam pada waktu itu. Dampak dari situasi ini, Dunia Islam mengalami fragmentasi sehingga mengakibatkan kolonialisasi barat terhadap seluruh wilayah Islam.

Sedangkan ide nasionalisme dan sistem negara modern yang banyak diterapkan sekarang pelbagai wilayah di dunia saat ini, di adopsi dari model sistem yang berkembang di Eropa sejak masa renaissance, dan dengan mengalami sedikit penyesuaian nilai dan lembaga traditional yang ada di negara tersebut. Di kemudian hari, nasionalisme hadir sebagai sebuah gerakan politik yang banyak dianut oleh wilayah-wilayah yang masyarakatnya mayoritas Islam. Pada akhirnya wilayah ini memilih memisahkan diri dari kekhilafahan untuk membentuk tata pemerintahan yang baru.

Alhasil ketika nasionalisme dan sekulerisme menggantikan Islam sebagai sebuah kredo dari pemerintahan negara yang baru berdiri, maka para mufti (pemimpin sunni) serta Ayatollah menemukan diri mereka berada di pinggiran masyarakat, paling tidak di bidang politik. Terbukti pada tahun 1924 Republik Turki menghilangkan kekhilafahan, yang berarti menghapus jejak kesatuan Islam, dan satu-satunya simbol penting yang menghubungkan dengan sejarah Islam masa lalu. Dunia Islam menemui dirinya dikuasai kolonialis yang tidak bertuhan, dan

dipaksa melepas identitas sehingga dunia Islam dicekam oleh perasaan kecurigaan terhadap semua aspek yang berkonotasi modern.<sup>1</sup>

Merunut lebih jauh, sistem negara dan alam pemikiran modernitas berhubungan erat. Kenyataannya pada saat itu bangsa-bangsa di benua eropa benar-benar hidup berdampingan di dalam sistem wilayah negara yang berkembang di Eropa pada awal modern. Dan sistem negara ini telah diterima sebagai model dari sistem dunia yang merupakan bagian dari arus sejarah modernitas. Meskipun pada awalnya negara-negara berdaulat hanya muncul di Eropa, namun sistem ini kemudian meluas ke Amerika Utara di akhir abad delapanbelas dan ke Amerika Selatan di awal abad kesembilanbelas. Ketika modernitas menyebar ke seluruh dunia sistem negara turut menyebar bersamaan dengannya. Afrika Sub-sahara, misalnya, masih terasing dari perluasaan sistem negara Barat sampai akhir abad kesembilanbelas, serta menjadi sistem kawasan negara – negara yang baru merdeka setelah pertengahan abad dua puluh<sup>2</sup>.

Di dalam sejarah peradaban Barat, seluruh kemajuan yang dimulai sejak renaissance telah meninggalkan atribut agama karena dianggap mengekang perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Pada perkembangan selanjutnya, akumulasi kemajuan manusia di berbagai bidang melalui penyingkapan seluruh fakta-fakta alam turut mempengaruhi cara pandang Barat tentang masyarakat. Di dalam dunia modern ini, masyarakat barat menolak keberadaan agama di ruang publik. Jadi modernitas atau lebih tepatnya westernisasi menggejala bersamaan dengan kolonialisme. Dibalik semua itu,

---

<sup>1</sup> Vali nasr, *Kebangkita Syiah : Islam, Konflik dan Masa depan*, Diwan, 2007, hal. 120.

<sup>2</sup> Robert Jackson & Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar, 2005, hal. 13.

modernitas juga membawa paham komunis, sosialis, demokrasi liberal dan tumbuh subur di wilayah bangsa - bangsa yang terjajah itu.

Fenomena ini juga banyak menjangkiti wilayah Islam yang kehilangan identitas politiknya. Islam didalam dunia modern hanya merupakan diskursus yang berkembang pada ruang akademik dan kehilangan ruang dalam masyarakat Barat. Diwaktu yang sama sekelompok pembela Islam coba menegakkan Islam puritan dan fundamentalis di wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya Islam. Sebagai agama yang sempurna, Islam adalah warisan masa lampau yang memiliki penafsiran tentang tujuan kehidupan manusia, arah perkembangan masyarakat dan cara memandang keberadaan dunia. Kelanggengan ini menuntut keberadaan sistem yang merupakan keniscayaan untuk mengatur masyarakat Islam sehingga agama dan politik tidak dipisahkan di dalam pemikiran politik Islam.

Kebangkitan dunia Islam secara politik di era global ini, berada ditangan para ulama Islam pembaharu yang mewarisi keilmuan Islam tradisional. Tradisi pemikiran yang tidak pernah terputus ini tetap dijaga oleh para ulama. Sehingga di abad dua puluh warisan masa lampau ini dihidupkan kembali dan juga mengadopsi ilmu pengetahuan yang berkembang di Barat.

Dalam sejarahnya periode antara abad 18 Masehi hingga abad 20 Masehi adalah awal mula mulai bermunculan pemikiran pembaharuan dalam Islam. Gerakan pembaharuan itu paling tidak muncul karena dua hal. Pertama, timbulnya kesadaran di kalangan ulama bahwa banyak ajaran-ajaran asing yang masuk diterima sebagai ajaran Islam. Ajaran itu-ajaran itu bertentangan dengan semangat ajaran Islam yang sebenarnya, seperti bid'ah, khurafat dan takhyul. Ajaran-ajaran

inilah, menurut mereka yang membawa Islam pada kemunduran. Oleh karena itu, mereka bangkit untuk membersihkan Islam dari ajaran atau paham seperti itu. Gerakan ini dikenal sebagai gerakan reformasi. Kedua, pada periode ini Barat mendominasi dunia di bidang politik dan peradaban. Namun persentuhan dengan Barat menyadarkan tokoh-tokoh Islam akan ketinggalan mereka. Karena itu, mereka berusaha bangkit dengan mencontoh Barat dalam masalah-masalah politik dan peradaban untuk melepaskan diri dari hegemoni<sup>3</sup>.

Pemikiran politik Imam Khomeini pun harus dipandang sebagai bagian dari kebangkitan Islam, diluar arus pemikiran Syi'ah di Iran yang memiliki perbedaan. Ditengarai bahwa pemikiran Imam Khomeini dipengaruhi oleh Maulana Mawdudi dan pemikir-pemikir Sunni lainnya di bidang politik<sup>4</sup>. Revolusi Islam Iran merupakan contoh dari kebangkitan gerakan politik yang ada di dunia Islam yang merespon kemunduran yang terjadi setelah berbagai peristiwa kejatuhan Islam secara politik. Kondisi ini terlihat jelas dengan perang 6 hari Arab - Israel untuk membebaskan Palestina dari agresi, pada saat itu aliansi negara-negara Arab mengalami kekalahan telat menghadapi Israel yang disponsori negara Amerika Serikat dan sekutu.

Dunia Islam dihadapkan juga pada krisis politik dunia yang terbagi menjadi dua polarisasi ideologi yang kuat. Kutub barat yang di wakili kaum Liberal-Kapitalis dan kutub timur kaum Sosialis-Komunis. Di dalam dunia yang terbagi dua kutub ideologi ini Islam harus menemukan identitas politik. Perjuangan dalam menegaskan identitas politik dengan menerima dan mulai mengadopsi pemikiran

---

<sup>3</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam : Dirasah Islamiyah II*, Rajawali Pers, 2001, hal. 173.

<sup>4</sup> Iqbal Siddiqi, "Imam Khomeini dalam Sejarah Muslim Kontemporer" dalam Abdar Rahman Koya, *Apa Kata Tokoh Sunni Tentang Imam Khomeini*, Pustaka Imam, 2009, hal. 23.

Barat dan model lembaga kekuasaan yang ada di barat banyak dilakukan sejumlah sarjana muslim. Keharusan untuk mengikuti ideologi tertentu membuat dunia Islam berada di dalam situasi bipolar memilih berkiblat ke Uni Soviet atau Amerika Serikat dan sekutu.

Iran dalam sejarah modern sebelum revolusi dipimpin oleh Mohammad Reza Pahlevi dengan sistem monarki absolut. Iran yang merupakan kolega negara Amerika Serikat dan Israel memilih membentuk CENTO<sup>5</sup> sebuah persekutuan militer bersama demi membendung pengaruh komunis Soviet di Timut Tengah. Tidak hanya itu, Iran juga melakukan modernisasi atau lebih tepatnya Westernisasi terhadap seluruh tatanan sosial yang ada Iran.

Revolusi Islam Iran lahir dari situasi ini. Agama Islam hendak dipisahkan dari identitas politiknya. Peran agama diprivatisasi hanya berhubungan dengan masalah-masalah individu, ulama menjadi penghias ritual-ritual keagamaan dan tidak memiliki peran sosial yang signifikan. Pemikiran politik Imam Khomeini memberikan jawaban meyakinkan terhadap usaha-usaha yang mencoba mengkerdilkan peran ulama dalam pemerintahan dan memisahkan agama dengan politik. Karena menurut penentang revolusi, politik sesuatu yang kotor tidak seharusnya ulama mengambil peran ini.

Dalam masalah politik luar negeri, Imam Khomeini melihat bahwa hubungan dengan semua negara harus dibangun atas dasar saling menghormati dan tanpa intervensi. Karena itu, Imam Khomeini menolak dominasi politik, ekonomi, budaya, dan militer melalui hubungan internasional. Atas dasar ini,

---

<sup>5</sup> Perjanjian kerja sama pertahanan dan militer yang terdiri dari negara Asia Tengah dan Inggris yang di sponsori Amerika Serikat untuk membendung pengaruh komunis, lebih lanjut lihat dalam kamus hubungan internasional.

setiap negara harus siap menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain jika tidak ada unsur saling menundukkan.<sup>6</sup> Seperti juga diungkapkan oleh Ali Khamenei tentang prinsip dasar revolusi ini yakni “Tidak bersandar (non-reliance) ke Timur atau ke Barat, merupakan suatu ciri khas lain dari revolusi ini, yang sekarang merupakan kebijakan mendasar dari sistem revolusi kami”<sup>7</sup>.

Ideologi politik Islam Iran merupakan basis utama pemikiran politik yang berkembang menjadi slogan politik luar negeri Iran yang menetapkan kebijakan-kebijakan strategis pemerintahan Islam Iran terhadap politik luar negeri dan internasionalnya. Maka uraian dari slogan politik luar negeri **laa syarqiyyah, laa Gharbiyah, Jumhuriyah Islamiyyah** dari judul sumbangan pemikiran politik Imam Khomeini terhadap pembangunan politik luar negeri Iran menjadi titik fokus karya ilmiah ini.

## **B. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini berusaha mengurai dengan jelas slogan politik luar negeri Iran yang berkembang pada awal revolusi Islam Iran. Untuk memahami slogan politik luar negeri Iran maka Imam Khomeini sebagai arsitek Revolusi Islam Iran tentunya memiliki konsep jelas dalam penjabaran desain pemerintahan Islam di Negara Iran. Teori pemerintahan Islam melalui pemikiran politik Imam Khomeini sebagai kerangka lahirnya slogan politik luar negeri Iran akan menjadi ulasan di dalam penyusunan penulisan karya Ilmiah ini. Tujuan yang lain adalah untuk

---

<sup>6</sup> Ahmad Khomeini, *Imam Khomeini*, Cahaya, 2004, hal. 262.

<sup>7</sup> Pernyataan Hujjatul Islam Sayyid Ali Khamenei Presiden Republik Islam Iran Pada Persidangan Ke-42 Sidang Umum PBB, 1987

memenuhi syarat-syarat memperoleh derajat keserjanaan Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **C. LATAR BELAKANG MASALAH**

Sejarah Iran modern tidak dapat dilepaskan dari ketokohan Imam Khomeini sang arsitek revolusi Islam Iran. Revolusi ini turut membawa perubahan di Timur Tengah dan secara keseluruhan dunia internasional. Di tingkat regional revolusi Islam Iran memberikan motivasi bagi tumbuh suburnya pemikiran politik Islam di negara-negara yang mayoritas menganut agama Islam. Sosok Ayatullah Khomeini adalah figur utama dibalik suksesnya Iran merubah pondasi politik internal dan memberikan alternatif pandangan politik baru bagi dunia Internasional.

Hal yang mendasar dari perubahan sosial politik di Iran pasca revolusi ialah pengaruhnya terhadap sistem politik Iran. Seiring perubahan tersebut maka diikuti pula oleh perubahan arah orientasi politik luar negeri Iran yang menyesuaikan dengan bentuk pemerintahan Republik Islam Iran. Dalam hal ini, kekhasan Pemerintahan Republik Islam Iran dikarenakan menganut konsep politik Islam yang dikembangkan oleh Imam Khomeini.

Arah politik luar negeri suatu negara tidak terlepas dari kondisi dan situasi politik dalam negeri pada negara yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan situasi politik dalam negeri suatu negara adalah yang terkait di dalamnya mengenai, tipe rezim yang berkuasa, ideologi yang menjadi dasar negara, kemampuan militer, dan kemampuan ekonomi. Tidak hanya itu, tetapi faktor



lingkungan internasional pun ikut mempengaruhi atau bahkan menentukan politik luar negeri suatu negara.<sup>8</sup>

Situasi yang berkembang di dunia internasional saat ini menempatkan front terbuka antara negara penentang dominasi Amerika Serikat dan sekutunya. Salah satu dari negara yang secara terang-terangan menentang dominasi Amerika Serikat adalah Iran. Sebelum revolusi, Iran merupakan negara yang dekat dengan pemerintahan Amerika Serikat, seperti diungkapkan sendiri oleh president Jimmy Carter:

*“Iran under the great leadership of the shah is as an island of stability in one of the more troubled areas of the world.”<sup>9</sup>*

Dibawah pemerintahan Syah Pahlevi Iran menjadi negara boneka Amerika Serikat. Ada dua alasan untuk menjadikan Iran menjadi Negara potensial melindungi kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Alasan pertama yakni menjadi buffer bagi penyebaran pengaruh Uni Soviet melalui ideologi Sosialisnya yang sedang mewabah diberbagai negara Arab pada saat itu. Alasan yang kedua menjadikan Iran sebagai polisi pengamanan di kawasan teluk Persia. Namun sejak tumbanganya Rezim monarkhi yang telah berdiri ribuan tahun oleh revolusi Islam Iran. Amerika Serikat dan Iran menjadi dua kutub yang selalu bersebrangan terhadap berbagai masalah dunia Internasional.

Ketegangan ini berawal dari dukungan Amerika Serikat terhadap rezim Syah Reza Pahlevi bahkan hingga kemenangan Revolusi Islam Iran, Amerikat

---

<sup>8</sup> Riza Sihbudi, *Dinamika Revolusi Islam Iran : Dari Jatuhnya Shah Hingga Wafat Ayatullah Khomeini*, Pustaka Hidayah. Jakarta, 1989, hal. 142.

<sup>9</sup> Newsweek, dalam Riza Sihbudi, *Dinamika Revolusi Islam Iran : Dari Jatuhnya Shah Hingga Wafat Ayatullah Khomeini*, Pustaka Hidayah. Jakarta, 1989, hal. 27.

Serikat tetap berusaha untuk campur tangan dalam transisi kekuasaan ini. Puncaknya ketika penyanderaan 50 orang Amerika Serikat di Teheran oleh demonstrasi mahasiswa Iran yang menuntut agar Amerika Serikat menyerahkan Syah Reza Pahlevi. Mereka diduga melakukan kegiatan mata-mata untuk membantu Rezim yang telah jatuh, dan pemerintah Amerika Serikat juga telah memberi suaka politik bagi Syah Pahlevi beserta kerabatnya.

Selaku arsitek revolusi Islam Iran Imam Khomeini memilih bersebrangan dengan negara-negara yang berusaha memaksakan kepentingannya terhadap Iran dan Umat Islam pada umumnya. Sejak kemenangan Revolusi Islam Iran terjadi perubahan radikal pada kebijakan politik luar negeri Iran. Negara Iran tidak lagi berada pada poros Amerika Serikat. Walaupun ditengah situasi dunia internasional yang melibatkan pertarungan ideologi politik antara blok timur dengan komunis-sosialis dan blok barat dengan paham liberalismenya. Namun keadaan ini tidak menempatkan Iran dalam situasi dilematis untuk memilih kebijakan politik luar negerinya. Sebaliknya, Iran tetap konsisten pada garis politik luar negerinya.

Di bawah Khomeini garis politik luar negeri Iran memilih sikap berbeda atau dengan semboyan ‘ tidak Timur , tidak Barat, tapi pemerintahan Islam’ (Ila Syarqiyyah, Ila Gharbiyah, Jumhuriyah Islamiyyah). Tentunya doktrin politik luar negeri ini berangkat pada ideologi Negara yang dianut oleh Iran. Karena pada prinsipnya kebijakan politik luar negeri setiap negara pasti memiliki keterkaitan kuat dengan kepentingan domestik Negara tersebut.

Slogan “tidak Timur tidak Barat, tetapi pemerintahan Islam” yang dicetuskan Khomeini, sangat populer pada masa-masa pergolakan 1978-1979. Slogan tersebut dijadikan landasan politik luar negeri republik Islam Iran. Slogan tersebut mencerminkan sikap penentangan Khomeini terhadap Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang kemudian dimanifestasikan dengan dukungan Khomeini terhadap penyanderaan para diplomat AS (4 November 1979), serta pembubaran partai komunis Tudeh dan pengusiran 18 diplomat Uni Soviet (4 Mei 1983). Penolakan Khomeini terhadap komunisme, sebelumnya telah ditunjukkan ketika Khomeini tidak menyertakan kelompok gerilya Marxis dalam pemerintahan sementara Republik Islam Iran. Walaupun pada awal revolusi kelompok tersebut memegang peranan penting dalam meruntuhkan Syah.<sup>10</sup>

Setelah revolusi Islam Iran, pemerintahan yang baru berdiri ini memulai babak baru dari politik luar negeri Iran. Kelompok ulama memegang peranan penting terhadap rumusan strategis kebijakan luar negeri Iran. Gambaran ini terlihat jelas dari sikap Imam Khomeini terhadap kedua blok ideologis yang dalam pandangannya bertentangan dengan identitas ideologi politik revolusi Islam Iran. Seiring perkembangannya pasca revolusi politik luar negeri Iran memilih membekukan hubungan diplomatik dengan Rezim Apartheid<sup>11</sup> Afrika Selatan, Zionis Israel dan Amerika Serikat sponsor terorisme global nyata.

Jika menggali lebih jauh persoalan isu terorisme dunia yang terlanjur dikonsumsi masyarakat dunia maka citra Islam selalu diidentikkan sebagai agama teroris. Media dalam hal ini, turut berperan untuk mengaburkan fakta

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 63.

<sup>11</sup> Politik pemisahan ras di Afrika Selatan, dasar dari politik apartheid adalah mempertahankan dominasi minoritas kulit putih.

sesungguhnya dari realitas masalah dunia kontemporer yang tidak lain bersumber dari arogansi kekuasaan Amerika Serikat. Berkaitan persoalan terorisme internasional Imam Khomeini mengungkapkan di dalam salah satu khotbah politiknya :

Sedemikian rupa mereka gambar-gemborkan bahwa mereka anti teroris, padahal justru merekalah yang teroris dan pusat terorisme dunia. Mereka menuduh Iran mendukung terorisme sebab Iran tidak memperdulikan mereka, dan inilah ukuran terorisme buat mereka. Menentang berarti terorisme, tapi pembantaian demi pembantaian yang mereka lakukan, pembunuhan demi pembunuhan yang mereka kerjakan bukan terorisme<sup>12</sup>.

Penolakan atas dominasi ideologis dan politik ini terlihat jelas dari slogan revolusi Islam Iran yang merupakan bentuk ijtihad pemikiran politik dan penegasan posisi Iran terhadap situasi dunia internasional saat itu. Oleh karena itu, slogan revolusi Islam Iran adalah penemuan kembali prinsip-prinsip politik Islam dari identitas politik Islam yang selama ini ditinggalkan oleh ulama dan intelektual yang terbaratkan. Sebagai sistem sosial politik, Islam ditempatkan sebagai model alternatif dari dua ideologi yang telah dikembangkan dunia pada saat ini.

Proses panjang dari pecahnya revolusi yang dikemudian hari menempatkan Iran sebagai negara Islam Syi'ah pertama, dengan model yang berbeda dari negara Islam yang telah lebih dulu dikembangkan oleh negara-negara yang menganut mazhab Sunni. Di dalam negeri Iran sendiri, bentuk negara Islam juga mengalami penentangan dari kaum nasionalis sekuler, komunis, dan yang ingin tetap mempertahankan monarkhi. Penolakan juga datang dari kalangan ulama Syi'ah

---

<sup>12</sup> Ayatullah Ruhullah al-Musawi al-Khomeni, "Cita-Cita Nabi Mencapai Makrifatullah", Dalam Sandy Alison, *Pesan Sang Imam*, Al-Jawad Publisher, 2000, hal. 66-67.

terhadap konsep negara Islam yang dibangun oleh Imam Khomeini, mengenai sejauhmana peran ulama dalam pemerintahan.

Di dalam konteks regional, gerakan Pan Arabisme yang dibangun Gamal Abdul Nasser<sup>13</sup> juga mempengaruhi posisi Iran yang secara identitas adalah bangsa Persia. Sentimen Nasionalisme Arab ini terus berlanjut hingga saat ini. Terlihat jelas sentiment ini digunakan oleh Saddam Husein ketika terjadi perang teluk. Tidak hanya itu, Iran yang dominan bermazhab Syi'ah dalam sejarah politik Islam selalu tersisihkan dalam kekuasaan dunia Islam di masa lampau. Iran juga dibenturkan dengan struktur dunia yang bipolar dimana mereka harus memilih untuk menolak segala kepentingan asing yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar revolusi Islam Iran.

Untuk menelaah lebih jauh pola dan strategi kebijakan politik luar negeri Iran. Maka menjadi sebuah keharusan untuk melakukan pengkajian terhadap pemikiran politik Imam Khomeini selaku tokoh arsitek revolusi Islam Iran dengan melihat prinsip pemikiran politiknya. Dasar pemikiran politik Islam Imam Khomeini dalam pemerintahan disusun dalam konsep Wilayahtul fakih. Menarik garis pemikiran politik Imam Khomeini sebagai landasan pembangunan politik luar negeri Iran maka kita akan mampu menganalisis sikap dan strategi kebijakan luar negeri Iran terhadap situasi dunia internasional kontemporer.

---

<sup>13</sup> Presiden mesir yang terbunuh oleh gerakan Islam radikal

#### **D. RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana sumbangan pemikiran politik Ayatullah Khomeini dalam konstruksi politik luar negeri Iran yang berbasis semangat laa Syarqiyyah, laa Gharbiyah, Jumhuriyah Islamiyyah ?.

#### **E. KERANGKA DASAR PEMIKIRAN**

Paradigma konstruktivisme merupakan salah satu varian dari berbagai pendekatan di dalam teori-teori sosial. Sebagai sebuah pendekatan dalam melihat gejala sosial, paradigma konstruktivis juga merupakan kritik terhadap pendekatan positivisme yang mereduksi manusia pada level kebendaan. Di dalam pendekatan ini, fakta alam dan fakta sosial merupakan sesuatu yang berbeda, fakta alam cenderung tetap sedangkan fakta sosial terus berkembang sejauh peradaban manusia itu sendiri.

Menurut Bagi Sadr sendiri bahwa ada perbedaan mendasar atas fakta kealaman dan fakta sosial yakni ;

Untuk mengetahui semua ini, kita harus mempelajari perbedaan-perbedaan penting antara sifat pengalaman sosial sifat pengalaman ilmu pengetahuan alam supaya kita dapat sampai pada kenyataan yang telah kita putuskan, yaitu bahwa eksperimen kealaman selama berabad-abad mampu memberikan kepada manusia suatu gambaran alam yang konkrit untuk dipergunakan dalam memanfaatkan gejala dan hukum-hukum alam. Akan halnya dengan pengalaman sosial, ia tidaklah dapat menjamin umat manusia untuk mampu menemukan ideologi yang konkrit berkenaan dengan masalah sosial.<sup>14</sup>

Kehidupan sosial manusia merupakan bidang pengkajian yang menempatkan seorang peneliti harus memilih sudut pandangnya dalam melihat

---

<sup>14</sup> Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Problematika sosial dunia modern; manusia mencari kebebasan dan tanggung jawab sosial di antara Islam, Sosialisme, dan Demokrasi Kapitalis*, RausyanFikr Institut, 2011, Yogyakarta, hal. 13.

fakta sosial. Di dalam pandangan ini seorang peneliti tidak dapat memisahkan antara sikap ilmiah dan tanggung jawab sosial yang memiliki keterkaitan satu sama lain.<sup>15</sup> Pada perkembangannya ilmu sosial terutama di dalam teori-teori ilmu hubungan internasional juga merupakan hasil dari proses tersebut. Teori konstruktivisme adalah salah satu teori yang dikembangkan dari paradigma sosial yang ada.

Konstruktivisme pada dasarnya mengasumsikan bahwa politik internasional adalah hasil dari suatu konstruksi sosial, yakni proses dialektika antara struktur dan agen. Di mana lingkungan sosial-politik dan manusia saling berinteraksi untuk menghasilkan perubahan-perubahan sosial-politik<sup>16</sup>. Lebih lanjut menurut kaum kontruktivis, dunia sosial bukanlah sesuatu yang given dan dunia sosial bukan sesuatu yang berada di luar sana dimana hukum – hukumnya dapat ditemukan melalui penelitian ilmiah dan dijelaskan melalui teori ilmiah, seperti yang diungkapkan kaum behavioralis dan kaum positivis. Melainkan, dunia sosial merupakan wilayah intersubjektif dimana dunia sosial sangat berarti bagi masyarakat yang membuatnya dan hidup didalamnya, dan yang memahaminya. Dunia sosial dibuat atau dibentuk oleh masyarakat dari waktu ke waktu dan tempat tertentu.<sup>17</sup>

Konstruktivis dibangun dari basis, norma, budaya, dan nilai. Atas dasar itulah konstruktivis digolongkan kedalam teori idealis. Kerangka teoritik konstruktivis menyatakan bahwa lingkungan sosial menentukan bentuk identitas

---

<sup>15</sup> Ignas Kleden, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, LP3ES, 1988, hal. 29.

<sup>16</sup> Soraya, "Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional" dalam <http://blog.ub.ac.id/soraya/>, diakses tanggal 11 Nopember 2011 pukul 11:16.

<sup>17</sup> Robert Jackson & Georg Sorensen, *Op.cit*, hal. 307.

aktor. Identitas kemudian menentukan kepentingan, dan kepentingan akan menentukan tingkah laku, aksi ataupun kebijakan dari aktor. Pada tahap berikutnya identitas juga akan mempengaruhi bentuk dari lingkungan sosial. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, Tindakan negara dalam pandangan konstruktivisme memberikan pengaruh terhadap bentuk sistem internasional, sebaliknya sistem tersebut juga memberikan pengaruh pada perilaku negara-negara. Dalam proses saling mempengaruhi itu terbentuklah itu apa yang disebut dengan kolektivitas makna. Kolektivitas makna itulah yang menjadi dasar terbentuknya intersubyektifitas dan kemudian membentuk struktur dan pada akhirnya mengatur tindakan negara-negara.<sup>18</sup>

Sekalipun berangkat dari asumsi ontologis yang sama, konstruktivisme berkembang melalui tiga varian yang berbeda : sistemik, level unit dan holistik. Konstruksi sistemik memiliki kesamaan dengan neorealis dimana keduanya memberikan perhatian hanya pada interaksi antara negara sebagai aktor-aktor tunggal dan mengabaikan semua proses yang berlangsung di dalam masing-masing aktor tersebut. Politik internasional dalam pemikiran konstruktivis sistemik, semata-mata memahami bagaimana negara berhubungan satu sama lain dalam ruang eksternal atau internasional. Varian kedua konstruktivisme melihat hubungan pengaruh norma-norma sosial dan legal di tingkat domestik bagi identitas. Oleh karena itu, kepentingan-kepentingan negara merupakan cerminan dari institusionalisasi norma-norma sosial dan legal ditingkat nasional negara tersebut. Sekalipun tidak mengabaikan peran-peran norma internasional dalam

---

<sup>18</sup> Soraya, "Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional" dalam <http://blog.ub.ac.id/soraya/>, diakses tanggal 11 Nopember 2011 pukul 11:16



membentuk identitas dan kepentingan negara, penekanan yang kuat pada aspek domestik merupakan cirri dari varian ini. Selanjutnya varian yang ketiga, konstruktivis holistik berusaha menjembatani kedua posisi dua varian konstruktivisme yang bertolak belakang di atas jalan melihat domestik dan internasional sebagai aspek berbeda dari tatanan sosial dan politik yang sama. Konstruktivis holistik berusaha menjelaskan dinamika perubahan global terutama berkaitan dengan muncul dan hancurnya negara berdaulat melalui hubungan timbal balik antara negara dan tatanan global tersebut.<sup>19</sup>

Alexander Wendt sebagai salah satu pemikir dalam studi hubungan internasional yang mengembangkan teori konstruktivis di dalam konsepnya mengenai struktur sosial Wendt mengutarakan bahwa :

Struktur sosial memiliki tiga elemen : pengetahuan bersama, sumber daya material, dan praktek. Pertama, struktur sosial dijelaskan, dalam beberapa hal, oleh pemahaman, harapan, atau pengetahuan bersama. Hal ini menciptakan aktor-aktor dalam situasi dan sifat hubungan mereka, apakah kooperatif atau konflikual. Dilema keamanan, sebagai contoh, adalah struktur sosial yang terdiri dari pemahaman intersubjektif di mana negara-negara sangat curiga bahwa mereka membuat asumsi-asumsi keadaan yang buruk tentang maksud masing-masing pihak, dan sebagai akibatnya mengabaikan kepentingan mereka dalam hal menolong diri sendiri. Komunitas keamanan merupakan struktur sosial yang berbeda, yang terdiri dari pengetahuan bersama di mana negara percaya satu sama lain untuk menyelenggarakan perselisihan tanpa perang. Ketergantungan struktur pada pemikiran-pemikiran ini adalah hal di mana konstruktivisme memiliki pandangan idealis ( atau 'orang-pemikir' ) struktur.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan pandangan sebelumnya bahwa narasi sosial (suprastruktur) merupakan sesuatu yang dibentuk sebagai pemahaman bersama oleh agen (negara/negarawan) mengenai lingkungan internasional. Maka realitas

---

<sup>19</sup> Muhadi Sugiono dan Ririen Tri Nurhayati, "Konstruktivisme" dalam <http://www.scribd.com/doc/Handout-7-Konstruktivisme>, diakses 8 Novemeber 2011 pukul 1: 15

<sup>20</sup> Alaxander Wendt, dalam Robert Jackson & Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar, 2005, hal. 308.

sosial adalah apa yang kita bentuk bersama, karena setiap tindakan agen dipengaruhi oleh lingkungan sekaligus merupakan penafsiran terhadap lingkungan tersebut. Sifat realitas sosial yang menghubungkan agen dengan suprastruktur juga sekaligus adalah ruang pertukaran kepentingan itu terjadi. Di dalam kedua hubungan antara agen dan struktur ini Wendt menjelaskan bahwa :

Struktur sosial memiliki dimensi yang secara inheren diskursif dalam pengertian bahwa mereka tidak bisa dipisahkan dari alasan dan pemahaman sendiri yang diawali para negarawan kepada aksi mereka. Kualitas diskursif tersebut tidak berarti bahwa struktur sosial dapat dikurangi menjadi apa yang para negarawan anggap sedang mereka lakukan, karena para agen mungkin tidak memahami peristiwa-peristiwa struktural dahulu – implikasi aksi mereka. Namun tidak berarti bahwa keberadaan dan operasi struktur sosial itu bergantung pada pemahaman bersama.<sup>21</sup>

Dengan demikian, apa yang disebut sistem internasional merupakan sesuatu yang terus berkembang. Pada perkembangannya tatanan dunia selalu merupakan wilayah penafsiran bersama dimana setiap agen berusaha menafsirkan dan sekaligus menerima pemahaman bersama situasi dari lingkungannya. Sistem internasional sendiri adalah lingkungan tempat unit (satuan) politik internasional beroperasi. Tujuan, aspirasi, lingkup pilihan, dan tindakan unit politik internasional tersebut sangat dipengaruhi oleh pembagian kekuasaan yang menyeluruh dalam sistem, oleh ruang lingkup, dan aturannya yang berlaku.<sup>22</sup>

Jadi di dalam sistem internasional setiap negara pasti memetakan orientasi nasionalnya, dimana keterlibatan suatu negara dalam berbagai isu internasional paling sedikit merupakan suatu ungkapan orientasi kebijakan umum terhadap terhadap bagian dunia lain. Yang kita maksudkan dengan orientasi ialah sikap dan

---

<sup>21</sup> Alexander Wendt, dalam Martin Griffiths, *Lima Puluh Pemikir; Studi Hubungan Internasional*, Rajagrafindo persada, 2001, hal. 276.

<sup>22</sup> K.J. Holsti, *Politik Internasional; Kerangka Untuk Analisis*, Edisi Keempat, Jilid 1, Erlangga, 1983, hal. 107.

komitmen umum suatu negara terhadap lingkungan internasional eksternal dan strategi fundamentalnya untuk mencapai tujuan dalam dan luar negerinya dan untuk menanggulangi ancaman berkesinambungan. Strategi atau orientasi umum suatu bangsa jarang diungkapkan dalam suatu keputusan, tetapi merupakan hasil dari serangkaian keputusan kumulatif yang di ambil dalam upaya untuk menyesuaikan tujuan, nilai, dan kepentingan dengan kondisi dan karakteristik lingkungan domestik dan eksternal. Oleh karena itu, kita dapat mengidentifikasi paling sedikit tiga orientasi fundamental yang telah diterapkan secara berulang, tanpa menghiraukan konteks sejarah. Orientasi itu adalah isolasi, nonblok dan pembentukan koalisi dan aliansi.<sup>23</sup>

Politik luar negeri Iran mengambil jalan yang berbeda, dengan membaca orientasi umumnya, karena memiliki kerangka ideologis dan teologis maka konstruksi ini sedikit berbeda dengan tipe orientasi tradisional yang dikemukakan oleh Holsti mengenai tipologi orientasi kebijakan luar negeri yang telah dijelaskan sebelumnya. Politik luar negeri Iran yang berkaitan dengan Syi'isme selalu berhubungan dengan konsep ummah. Menurut Ali Syari'ati, istilah ummah mengandung pengertian bahwa sekumpulan manusia yang para anggotanya memiliki tujuan yang sama, yang satu sama lain saling bahu-membahu agar bisa bergerak menuju tujuan yang mereka cita-citakan, berdasarkan kepemimpinan kolektif.<sup>24</sup> Dengan demikian, solidaritas internasional yang disuarakan Imam Khomeini mengenai persatuan Islam memiliki pengertian yang dibangun dari konsep ummah yang telah ada di dunia Islam sejak masa kenabian. Parsatuan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 108

<sup>24</sup> Ali Syari'ati, *Ummah dan Imamah; Sebuah Kontruksi Sosiologis Pengetahuan dan Interaksi Simbolik dalam Otentisitas Ideologi dalam Agama*, RausyanFikr, 2010, hal. 50-51.

Islam merupakan syarat bagi berlakunya sistem Islam secara luas yang berarti penolakan Imam Khomeini terhadap sistem internasional yang dibangun oleh kaum kapitalis-liberal dan Sistem sosialis yang di sponsori oleh Uni Soviet melalui komunisme internasionalnya.

#### **F. HIPOTESA**

Sumbangan pemikiran politik Ayatullah Khomeini dalam konstruksi politik luar negeri Iran yang berbasis semangat laa Syarqiyyah, laa Gharbiyah, Jumhuriyah Islamiyyah adalah ;

1. Orientasi politik luar negeri bebas aktif yang berbasis Islam
2. Orientasi politik luar negeri yang berbasis kepada soladaritas Dunia Islam

#### **G. JANGKAUAN PENELITIAN**

Batas waktu yang di ambil adalah dari revolusi Islam Iran tahun 1978 hingga wafatnya Imam Khomeini pada tahun 1989. Kurun waktu tahun 1978 sampai dengan tahun 1989 merupakan masa kepemimpinan spiritual Imam Khomeini dalam pembentukan dan konsolidasi politik di Iran.

#### **H. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang menggunakan data-data yang tersedia dari berbagai literatur dari berbagai buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, otobiografi dan karya tulis lainnya yang pernah dibuat oleh tokoh yang

gagasannya pernah diangkat dalam bentuk skripsi serta rekaman audio-visual berupa pidato dan wawancara yang pernah dilakukan tokoh tersebut.

## **I. SISTEMATIKA PENULISAN**

*Pada Bab I* akan diuraikan mengenai tujuan pemilihan judul, latarbelakang permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

*Pada Bab II* akan diuraikan mengenai sejarah perkembangan doktrin politik Syiah di Iran.

*Pada Bab III* akan diuraikan gagasan politik Imam Khomeini mengenai dinamika ekonomi politik internasional pasca Perang Dunia II.

*Pada Bab IV* akan diuraikan konstruksi politik luar negeri Iran yang berbasis *la Syarqiyah la Gharbiyah*.

*Pada Bab V* memuat kesimpulan keseluruhan uraian pada bab-bab sebelumnya.